

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

Mulyono Yalia¹, Noneng Sumiaty²

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika
Bandung (BPSDMP) Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI
Jl. Pajajaran No. 88 Bandung-40173, Jabar, Telp.022-6017493, Fax.022-6021740
HP. 081321482939. *e-mail*: mulyonoyalia@gmail.com; none001@kominfo.go.id

ABSTRAK

Fokus utama dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial atau Kelompok Informasi Masyarakat, selanjutnya disingkat (KIM) di Kota Cirebon Jawa Barat. Pembatasan masalah diidentifikasi sebagai berikut: (1) Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan media komunikasi sosial di Kota Cirebon Jawa Barat; (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan lembaga komunikasi sosial di Kota Cirebon Jawa Barat; (3) Upaya-upaya apakah yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan lembaga komunikasi sosial di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian dikemukakan bahwa di dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial di kota Cirebon Jawa Barat melalui pendekatan faktor-faktor implementasi kebijakan ditemukan dimensi lain, yaitu pentingnya pengawasan dan koordinasi.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan

DEVELOPMENT POLICY IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT INSTITUTE OF SOCIAL COMMUNICATION

ABSTRACT

The main focus of this research is the development of policy implementation and empowerment of institutions of social communication (KIM) in the district of West Java Cirebon City. Restrictions issues identified as follows: (1) How is the implementation of government policy in the empowerment of social communication media in Cirebon City of West Java; (2) What factors are supporting and inhibiting the implementation of government policy in the empowerment of institutions of social communication (KIM) in the district of Cirebon City, West Java; (3) Measures are implemented by the Office of Communications and Information Provincial / District / City in realizing the government's policy in the empowerment of social communication in public institutions. The research method used in this study is a qualitative method of data collection techniques through participant observation and in-depth interviews. Based on the results that in the implementation of government policy on the development and empowerment of institutions of social communication in the district of West Java Cirebon City through approach of policy implementation factors found another dimension, namely the importance of supervision and coordination.

Keywords: *Policy Implementation, Empowerment*

PENDAHULUAN

Kondisi geografis Indonesia yang tersebar dalam berbagai pulau, menyebabkan kendala kesenjangan informasi dikalangan masyarakat terpencil maupun di perbatasan, sementara kebutuhan akan informasi merupakan hak seluruh masyarakat tanpa kecuali, termasuk masyarakat di pedesaan/perkotaan. Pada sisi lainnya kondisi eksisting menunjukkan sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan memadai untuk menelaah muatan informasi, baik karena faktor sosial (edukatif), ekonomis maupun kultural selain adanya keterbatasan akses dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi .

Peran pemerintah di bidang informasi dan komunikasi dalam era Reformasi, Otonomi dan Desentralisasi semakin terbatas, sehingga menimbulkan kegamangan dalam diseminasi informasi, sementara masyarakat masih membutuhkannya, terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kawasan pedesaan /perkotaan. Untuk mengatasi hambatan informasi di masyarakat pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Permen Kominfo No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan

pengembangan dan pemberdayaan komunikasi. Selanjutnya sebagai implementasi dari kebijakan tersebut telah dikeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/Per/M.Kominfo/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa lembaga komunikasi sosial adalah Lembaga Komunikasi Pedesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga pemantau Media dan lembaga Komunikasi Organisasi Profesi. Selanjutnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa lembaga Komunikasi Pedesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disingkat (KIM) yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Tujuan KIM antara lain untuk memenuhi kebutuhan informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM dalam

mendukung keberhasilan pembangunan. Keberadaan kelompok ini diharapkan mampu menjadi jejaring penyampaian informasi mulai dari pusat kota sampai ke pelosok perdesaan.

Seiring dengan arus informasi yang makin mendera dewasa ini, keberadaan KIM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan paradigma komunikasi dengan masyarakat (*communication with the people*) bukan lagi komunikasi untuk masyarakat (*communication for the people*). Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial KIM diarahkan untuk:

1. Mewujudkan jejaring diseminasi informasi nasional;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
3. Mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengonsumsi informasi; dan

Salah satu pendekatan studi implementasi kebijakan adalah dengan pendekatan *implementation approach*. Empat faktor yang menunjang dalam implementasi kebijakan publik adalah sumber, kecenderungan, komunikasi dan tingkah laku birokrasi. Keempat unsur atau faktor ini satu sama lain saling menunjang

4. Membangun masyarakat informasi

Kota Cirebon merupakan salah satu kota yang berbasis wisata sejarah dan religi di Jawa Barat yang telah melaksanakan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Di Kota Cirebon kelompok informasi sosial masyarakat telah terbentuk sebanyak 22 Kelompok Informasi Masyarakat, tersebar di 5 Kecamatan dan 22 kelurahan, dengan bidang aktifitas meliputi Kelompok Pengrajin souvenir khas kota Cirebon, Kelompok Home Industri Ikan Asin dan Terasi, Kelompok Peduli Pantai, dan Kelompok Home Industri Gula Merah.

Sehubungan dengan itu, penulis tertarik untuk meneliti fenomena dimaksud secara lebih mendalam yang hasilnya disusun dalam bentuk laporan penelitian dengan judul: “Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Kelompok Informasi Masyarakat”

dan berinteraksi satu sama lainnya. Proses implementasi kebijakan lebih penting dari seluruh kegiatan proses kebijakan (Wahab 1990, 45). Kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo pada bidang pemberdayaan lembaga komunikasi sosial didasarkan pada pemahaman akan pemanfaatan sumber daya manusia serta

kontribusi bagi pemberdayaan perekonomian masyarakat. Salah satu pendorong pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat adanya kebijakan dari pemerintah melalui permen kominfo nomer 08/Per/M/Kominfo/6/2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (KIM) di Jawa Barat; 2) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan

Lembaga Komunikasi Sosial (KIM) di Jawa Barat; 3) Upaya-upaya apa yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Propinsi/Kab/Kota dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Kelompok Informasi masyarakat (KIM). Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam dari implementasi kebijakan Pemerintah Tentang Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial KIM berdasarkan Permen Kominfo Nomor 08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial serta memperoleh konsep yang dapat digunakan bagi pengembangan media Tradisional yang ada di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang memusatkan kepada fakta dan menggunakan analisis perbandingan untuk melakukan generalisasi empiris terhadap fenomena-fenomena sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendasar (*verstehen*) terhadap masalah-masalah sosial secara holistik dan impresif dengan menggabungkan analisis dan interpretasi data yang ditampilkan

secara naratif. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2002) yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif: "Merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah".

Bogdan dan Biklen (1992:29) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sehingga diperoleh suatu pemahaman dan penjelasan tentang terjadinya suatu proses. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini mengutamakan kualitas analisa dan bukan data-data yang bersifat statistik. Oleh karena itu penjelasan tidak berupa angka melainkan berupa kata-kata dan dokumentasi.

Penelitian kualitatif sendiri dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek seperti dikatakan Sugiyono (2005:1) bahwa; “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk penelitian pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci...“. Nasution sebagaimana dikutip Sugiyono (2005:1) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya“.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengembangan dan PEMBERDAYAAN Lembaga Komunikasi Sosial di kota Cirebon Jawa Barat

Surachmad (2004:140) mengatakan bahwa, “Penelitian kualitatif bersifat induktif, karena tidak dimulai dari hipotesis sebagai generalisasi untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan data yang bersifat khusus“. Menurut Surachmad dalam penelitian kualitatif objek yang diteliti dari satu unit atau kesatuan unit dipandang sebagai kasus. Kasus dapat terbatas pada satu orang, satu lembaga, satu keluarga, satu peristiwa dari satu wilayah, ataupun satu kelompok manusia dan kelompok objek-objek lain yang cukup terbatas dipandang sebagai satu kesatuan.

Melalui metode kualitatif maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Maka akan dapat diperoleh data yang lebih tuntas dan pasti, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi tentang implementasi kebijakan Menkominfo tentang Pedoman Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial berdasarkan Permen Kominfo No. 08/Per/M.Kominfo/6/2010.

Peran media kelompok komunikasi sosial dalam penyebaran informasi sudah terbukti dapat membawa masyarakat untuk bisa memahami setiap informasi yang

disampaikannya, melalui Kelompok Informasi Sosial, terutama bagi masyarakat perdesaan, yang digunakan sebagai alat silaturahmi dan pengembangan usaha bersama. Media komunikasi informasi yang dimaksud dalam penelitian adalah Kelompok Informasi Masyarakat yang mampu memberikan informasi atau yang mampu menyampaikan penyebaran informasi pembangunan dari pemerintah maupun sebagai basis usaha peningkatan ekonomi kelompok, sehingga fungsi media ini dapat berperan sebagai sarana diseminasi informasi, pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Selanjutnya penulis akan membahas Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kota Cirebon Jawa Barat dengan pendekatan pada konsep Organisasi, interpretasi, Aplikasi.

a. Organisasi Pelaksana Kebijakan

Daya dukung organisasi menyangkut tentang seberapa mungkin program dilaksanakan sesuai kebijakan yang ada dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, dukungan organisasi dalam

pembentukan KIM ini dapat dilaksanakan, dan bertindak sebagai pelaksana kebijakan organisasi. Seperti dikatakan oleh Udai Pareek, "Komunikasi keorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses aliran (pengiriman dan penerimaan) pesan-pesan yang berorientasikan tujuan diantara sumber-sumber komunikasi, dalam suatu pola dan melalui suatu medium atau media". (1996:97).

Hasil penelitian dan wawancara dengan responden di lapangan menunjukkan bahwa, kebijakan pada organisasi mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengakses setiap informasi, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Organisasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Organisasi KIM berupaya untuk mempertahankan kesinambungan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, budaya dan kegiatan lain yang bersifat ekspresif dan bersifat profit oriented. Faktor organisasi dianggap

penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan yang dilakukan yaitu : 1) Rata-rata anggota KIM, baik KIM Pembuatan *souvenir* khas kota Cirebon maupun KIM Peduli pantai, KIM pembuatan dan pengepakan ikan asin dan terasi, KIM pengelolaan sampah sudah memiliki kemampuan dalam mengakses media, karena rata-rata mereka adalah lulusan SMA dan bahkan ada mahasiswa, khususnya KIM Peduli Pantai sedangkan KIM Pengepakan dan pembuatan ikan asin, dan terasi rata-rata sudah cukup tua tapi rata-rata lulusan SD atau SMP sehingga mereka kurang memahami dalam penggunaan TIK, secara tidak langsung KIM peduli Pantai dan pengolah sampah serta KIM *souvenir* mereka telah mampu dalam mengakses media, baik secara formal/pendidikan maupun informal/otodidak. Dari hasil wawancara dengan 5 (lima) KIM ini yang lebih menonjol dalam mengakses media maupun dalam menyerap informasi lebih menonjol kelompok KIM Peduli Pantai, dan pengelola sampah karena masih muda dan energik, sedangkan untuk KIM Pengrajin Ikan Asin dan terasi, *souvenir*, mereka kurang menonjol dalam penguasaan media karena mereka rata-rata sudah usia di atas 35 tahun, secara penguasaan TIK masih

cukup jauh, tapi rata-rata juga mampu dalam mengakses informasi, terutama dalam melihat harga pasaran serta keberadaan bahan baku ikan. Sedangkan KIM Peduli Pantai sudah mampu dari mulai menggali potensi, memasarkan potensi pantai; 2) Pembagian Wewenang kelima KIM tersebut sudah berjalan dengan baik berpedoman pada struktur organisasi yang sudah ada. Dalam pelaksanaan kelima KIM tersebut juga telah melakukan pendelegasian wewenang kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan organisasi KIM, mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu yang ada pada pimpinan, pendelegasian merupakan asas yang harus dilaksanakan dalam setiap organisasi untuk menjaga kelancaran jalannya organisasi tersebut; 3) Kelima KIM yang ada di kota Cirebon ini sudah menerapkan perintah kerja di setiap Unit yang dikelolanya, karena setiap unit sudah terikat oleh struktur organisasi KIM.

b. Interpretasi

Keberadaan SDM dalam pengelolaan bidang usaha di KIM sudah bisa dikatakan mandiri karena sudah bisa menghidupi kelompok sendiri, walaupun dalam penguasaan IT masih rendah. Pedoman umum operasional kebijakan belum terlaksana secara baik karena banyak yang baru dibentuk dan sudah dibina oleh Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik

Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Pemkot Cirebon, pembinaan keberadaan KIM dilakukan secara maksimal, diupayakan untuk bisa melaksanakan pedoman operasional tersebut sehingga masing masing KIM dapat melaksanakan tujuannya.

c. Aplikasi (Penerapan Kebijakan)

Sarana dan prasarana untuk menunjang kelengkapan administrasi telah memadai mengingat KIM dinilai telah banyak membantu operasional kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar kelurahan dan untuk kantor di beberapa kantor kelurahan telah di sediakan ruangan khusus untuk aktivitas KIM. Dengan demikian KIM sarana untuk berkumpul telah dimiliki, sehingga untuk mendapatkan informasi dan diseminasi informasi dapat dilakukan di tempat ini. Telah menjadi prioritas mengingat sebagai kota wisata sejarah/religi dan wisata alam sistem administrasi/birokrasi telah berjalan sebagai mana suatu pemerintahan yang baik, bahkan sarana dan prasarana oleh pemda kota sendiri telah memadai.

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan lembaga komunikasi sosial dilaksanakan secara swadaya, hasil dari jasa usaha pengepakan Ikan asin, pembuatan terasi, pembuatan kerajinan tangan, dan pengelolaan Bank sampah masih belum tertata rapi dalam pengelolaan

keuangannya setiap minggunya, tetapi semenjak dibentuk KIM dicoba untuk menata sistem anggaran. Sedangkan KIM Pulasaren di dalam menunjang pelaksanaan bergerak dalam bidang usaha kerajinan tangan yang dikelola oleh para anggotanya dan memasarkan langsung di lokasi keraton, sedangkan bidang usaha lainnya adalah mengembangkan usaha sembako dan pembibitan ikan yang akan dipasarkan ke setiap rumah makan dan pasar.

Reward and punishmant di kedua KIM ini tetap ada dalam pengelolaan organisasi dengan tujuan agar anggota lebih disiplin dan mampu bersaing dalam upaya memajukan kelompoknya. Komunikasi yang intensif terus dilakukan hampir setiap hari mengingat pelaksanaan operasional kegiatan berjalan bersama setiap hari. SDM sudah memadai, mengingat mereka telah terlatih secara otodidak, tapi semenjak dibentuk KIM ini mereka lebih terorganisir dan saling *support* di dalam setiap unitnya, kekurangan yang belum terpenuhi sampai saat ini adalah sumber daya teknik informasi yang belum memadai, karena masih menggunakan perangkat TI yang sudah tua, serta masih memerlukan pembinaan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada. Fasilitas yang tersedia seperti komputer belum memadai, tetapi fasilitas operasional sudah terpenuhi,

hanya tinggal mengelola SDM yang ada, sehingga mereka tertib administrasi dalam organisasi. Sarana dan prasarana belum menjadi prioritas mengingat keterbatasan dana bagi pengembangan organisasi, bantuan dari pemda sendiri masih sebatas penunjukan, pembinaan secara khusus belum ada, maka hal ini akan berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi

Kebijakan-kebijakan berjalan dengan tujuan yang berlawanan sehingga terjadi keretakan dan batas-batas organisasi. Dengan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Nomor 08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sudah saatnya pihak Dinas Komunikasi dan Informatika di daerah merubah pandangan serta tugas dan struktur yang ada didalam Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) itu sendiri, hal ini akan ditunjang dengan bagaimana hasil akhir dari sebuah kebijakan, apakah akan meningkatkan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Jawa Barat, atau bahkan malah menurun. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskominfo/Dishubkominfo sudah menjadi tolak ukur untuk meningkatkan peran media komunikasi sosial di Jawa Barat.

Dukungan birokrasi dalam program aktivitas KIM antara lain: 1) Mekanisme,

aktivitas untuk mengakses informasi melalui survey lapangan di tempat serta tukar menukar informasi dengan pengelola kelompok lain, serta bertukar pikiran dengan para ahli kepariwisataan, maupun para tamu, terutama dalam memberikan pelayanan yang prima; 2) Hasil temuan di lapangan maupun setelah mengakses informasi kemudian di diskusikan dalam kelompok dan diambil kebijakan melalui rapat anggota. Pertemuan rutin setiap hari setelah selesai bertugas untuk melakukan evaluasi sekaligus, dan jika ada hal-hal yang dianggap urgen maka diambil keputusan melalui rapat khusus; 3) Mekanisme KIM dalam menerapkan atau mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang diperoleh, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi walaupun dengan perangkat yang seadanya; 4) Mekanisme hubungan antar anggota setiap KIM secara teratur dalam rangka tukar menukar informasi dilakukan secara *face to face*, sehingga ada saling dukung dalam operasional pelaksanaan tugas; 5) Mekanisme Diseminasi Informasi yang dilakukan oleh KIM melalui *booklet*, iklan di situs internet, *leaflet* juga penggunaan sarana IT lainnya; 6) Mekanisme penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh KIM, masyarakat langsung menyampaikan ke

anggota KIM selanjutnya setiap informasi direspon langsung oleh anggota KIM.

Faktor penunjang dan penghambat Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kota Cirebon Jawa Barat

Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat pengembangan dan pemberdayaan Lembaga komunikasi sosial diantaranya adalah: a) Penghambat seperti biaya/anggaran, SDM dan sarana IT; b) Organisasi, dukungan penuh dari instansi pemerintah adalah Diskominfo Statistik, sedangkan hambatan yang dirasakan adalah minimnya fasilitas, karena tidak semua KIM memiliki fasilitas untuk aktifitas hariannya; c) SOP, sudah berjalan dengan baik, sedangkan hambatan kemampuan teknik individu dalam penguasaan kewilayahan telah cukup terakomodir oleh kelurahan sebagai pembina kewilayahan; d) Hambatan lainnya, kemampuan di bidang pemanfaatan TIK anggota belum menyeluruh, penggunaan bahasa asing anggota KIM belum sepenuhnya menguasai; e) Struktur organisasi berjalan dengan baik, karena masing-masing sudah memahami tugasnya masing-masing; f) Peningkatan mengakses informasi dilakukan melalui pemanfaatan media IT/internet maupun pertukaran informasi melalui saling kunjungan ke kelompok lain dengan menggunakan anggaran sendiri; g)

Peningkatan diskusi, tukar menukar informasi dan memecahkan masalah, diskusi selalu dilaksanakan setiap hari di waktu istirahat, maupun dalam acara *briefing*, selama ini tidak ada hambatan dalam melaksanakan tatap muka dengan anggota; h) Tahapan awal penerapan kebijakan telah dilaksanakan, yaitu dengan memanfaatkan *blogs* sekaligus memperkenalkan keberadaan kelompok untuk diketahui oleh umum bahwa di kota Cirebon ada kelompok KIM yang memiliki usaha, selanjutnya kebijakan awal ini dibagi menjadi beberapa kelompok unit usaha karena anggota cukup banyak, dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda maka di bentuk beberapa unit usaha lainnya; i) Peningkatan *Networking* yang merupakan hubungan antar KIM berjalan dengan baik, selalu melakukan koordinasi dengan antar anggota guna memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh lembaga/kelompok; j) Peningkatan diseminasi informasi secara khusus ke masyarakat lokal belum ada karena dari organisasi masih fokus untuk meningkatkan diseminasi internal dulu dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam melaksanakan diseminasi informasi nantinya; k) Peningkatan dan penyerapan aspirasi

masyarakat, selalu ditingkatkan frekuensinya agar penyerapan selalu dilaksanakan dan diakomodir, karena informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai evaluasi dan masukan bagi pengembangan KIM selanjutnya.

Upaya yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Cirebon dalam pengembangan dan Pemberdayaan lembaga Komunikasi Sosial (KIM)

Hasil penelitian tentang upaya yang dilaksanakan oleh DISKOMINFO kota Cirebon, menunjukkan beberapa hal yaitu: 1) Belum ada upaya yang rutin dalam pemberdayaan KIM, karena anggaran belum ada, serta baru dibentuk sehingga perhatian dari Pemda belum begitu signifikan dalam pemberian perhatian terhadap KIM; 2) Organisasi pelaksana sudah ada, dan baru dibentuk sebagai KIM, sehingga masih membutuhkan pembinaan dan perhatian dari pemerintah daerah; 3) SDM belum memenuhi karena masih banyak yang belum menguasai tata kelola informasi, bahkan hampir semua anggotanya berada dipinggir pantai kota Cirebon; 4) Pengelolaan lembaga KIM, struktur organisasi sudah terbentuk dan sudah berjalan; 5) Akses informasi dari berbagai sumber sudah berjalan lancar, hanya dalam pengelolaan atau tata kelola informasi anggota belum bisa melaksanakan secara penuh; 6) Diskusi

maupun tukar menukar informasi dan juga dalam memecahkan masalah sudah berjalan, terutama bila ada informasi baru, hanya dalam pengelolaan informasi belum maksimal dimanfaatkan; 7) Dengan memanfaatkan sarana TIK sebesar besarnya diharapkan mampu memberikan penghasilan yang maksimal bagi lembaga KIM sendiri; 8) Untuk meningkatkan *networking* yang merupakan hubungan antar KIM, telah dijalankan dengan baik dengan dinas terkait, yaitu dengan Dinas Komunikasi dan Statistik mengingat usia KIM yang masih muda sehingga koordinasi dalam pemanfaatan *networking* belum berjalan dengan baik; 9) Untuk meningkatkan diseminasi Informasi dirasakan telah berjalan dengan baik; 10) Untuk kelancaran program diseminasi informasi serta menyerap aspirasi dari masyarakat maupun anggota, maka diharapkan ada suatu lembaga terpisah yang menangani bidang informasi dan komunikasi di kalangan komunitas/KIM sehingga program pemerintah bidang kominfo dapat berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional, Diskominfo Provinsi, Diskominfo Kota dan Kabupaten di Jawa Barat terdapat faktor penunjang maupun penghambat. Faktor penunjang diantaranya adanya Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika yang mendukung dan memanfaatkan keberadaan media tradisional dan lembaga sosial masyarakat lainnya, banyaknya media kelompok sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana diseminasi informasi dari pemerintah ke masyarakat maupun pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, serta adanya *event-event* seperti Pekan Informasi Nasional yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Kelembagaan Komunikasi Sosial. Faktor penghambatnya diantaranya adalah kurangnya dukungan dana pelaksanaan kebijakan, tidak optimalnya perhatian dari pemerintah local seperti pemanfaatan Kelompok Komunikasi Sosial sebagai sarana diseminasi transformasi informasi kebijakan, rendahnya minat masyarakat bergabung dengan kelompok komunikasi sosial yang ada didaerahnya, dan kurangnya dukungan *stakeholders*.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, selanjutnya peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Faktor Implementasi Organisasi, dan Interpretasi, sebagai pendekatan implementasi kebijakan pemerintah daerah belum terwujud secara ideal

sehingga Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Cirebon belum optimal dan berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh makna bahwa terdapat dimensi lain yang turut memberikan arah bagi Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kota Cirebon Jawa Barat, yaitu dimensi pengawasan dan koordinasi serta penguatan aturan hukum.

b. Faktor penunjang pelaksanaan kebijakan Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial ditemukan berupa bentuk kebijakan yang bersifat umum seperti Peraturan Daerah atau bentuk peraturan lainnya yang ada pada tingkat lokal serta dukungan sarana dan prasarana termasuk ketersediaan anggaran operasional yang ditetapkan melalui APBD. Di sisi lain secara eksternal perhatian DPRD terhadap upaya Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sangat rendah.

c. Upaya-upaya yang dilakukan Diskominfo Provinsi maupun Diskominfo Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di antaranya melalui sosialisasi kebijakan-

kebijakan pemerintah Nomor 08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Jawa Barat.

Saran

Pengawasan atau kontrol terhadap keberadaan KIM sebaiknya dilakukan lebih intensif mengingat informasi yang dibutuhkan oleh kelompok sangat bervariasi sehingga Dinas yang bersangkutan sebagai pembina bisa memberikan arahan yang dibutuhkan oleh kelompok. Faktor penunjang pelaksanaan kebijakan pengembangan hendaknya

ditunjang oleh kebijakan Perda yang menguatkan posisi lembaga KIM ini, dengan demikian dukungan dari pemerintah daerah semakin kuat dan terjalin adanya kemitraan dengan dinas lainnya.

a. Sosialisasi kebijakan pemerintah ini diharapkan lebih intensif lagi dilakukan oleh Diskominfo statistik, kota Cirebon bahkan sebaiknya untuk menangani keberadaan KIM ada alokasi dana khusus bagi pengembangan KIM yang dirasakan sangat bermanfaat ini apalagi kalau ada kerjasama dengan pihak swasta dalam pemberdayaan KIM.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, Chaedar, (2003). *Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang Dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya
- Bogdan & CR Biklen,SK (1992) *Qualitative Research For Education :An Introduction,Theory and Methods*.Boston ,Allyn &Bacon
- Cresswell, John W. (2002). *Research Design Qualitative And Quantitative Approches*. Thousand Oaks: Sage Publication
- Jones.O.Charles 1984 .*Pengantar Kebijakan Publik (terjemahan)* PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Nazir Moh.(1999).*Metode Penelitian* .Jakarta Ghalia Indonesia
- Pareek, Udai. (1996), *Perilaku Organisasi*, Seri Manajemen no 98. LPPM Jakarta. PT. Pustaka Binaman Presindo.
- Sugiyono.2009.*Metode Penelitian Kualitative dan R&D* . Alfabeta Bandung
- Surakhmad,Winarno 2004 .*Pengantar Penleitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknis*. Banadung Tarsito
- Sutopo H.B.2002. *Metode Penelitian Kualitativ*.UNS Surakarta
- Wahab, Solichin Abdul. (2002). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yayat Hayati Djatmiko DR.*Perilaku Organisasi* .Penerbit Alfabet Bandung 2008
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/PER/M.KOMINFOO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan

Pemberdayaan Lembaga Komunikasi
Sosial.